

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks karena berhubungan dengan banyak hal, seperti rendahnya tingkat upah dan konsumsi, serta ketidakmampuan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan secara langsung (Fithri & Kaluge, 2017). Di Asia Tenggara, Indonesia adalah salah satu negara berkembang dengan banyaknya jumlah penduduk 273,8 juta jiwa, Indonesia menghadapi berbagai masalah Sosial-Ekonomi yang sangat kompleks. Salah satu tantangan sering ditemui negara berkembang terkhususnya Indonesia sejak jaman dahulu ialah masalah kemiskinan.

Hal tersebut disebabkan karena kemiskinan juga bersifat secara multidimensional yang berarti kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga kemiskinan juga memiliki berbagai aspek utama dan sekunder. Aspek utama mencakup kekurangan pengetahuan, organisasi sosial dan politik, serta keterampilan. Sementara aspek sekunder meliputi kekurangan sumber finansial, informasi, serta kemampuan untuk mengakses tempat. Hal ini dapat digambarkan dalam kurangnya gizi, sanitasi yang memadai, tempat tinggal yang layak, layanan kesehatan yang layak, dan rendahnya tingkat pendidikan (Suripto & Subayil, 2020).

Kemiskinan erat kaitannya dengan faktor-faktor seperti halnya investasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, tingkat pendidikan dengan perhatian utamanya pada faktor kemiskinan dalam perkembangan kebijakan nasional (Suripto & Subayil, 2020). Secara umum, pemerintah tidak hanya mengarahkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi dalam melakukan pembangunan, tetapi juga memperhatikan dan mengidentifikasi dampak potensial terhadap kemiskinan yang mungkin disebabkan oleh proses pembangunan tersebut (Agustina et al., 2019). Para ahli ekonomi berpendapat hingga sampai akhir tahun 1960-an bahwa cara yang efektif untuk mengatasi keterbelakangan ekonomi, diperlukan laju pertumbuhan ekonomi lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk.

Hubungan antara pengangguran dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan setiap negara, negara dengan ekonomi maju maupun negara dengan ekonomi berkembang sangat erat, permasalahan pengangguran ialah suatu keadaan yang tidak terhindar (Budhijana, 2020). Kaitannya kemiskinan dengan pengangguran ialah keadaan dimana kegagalan individu dalam mencukupi kebutuhannya baik untuk makan, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal. Dalam hal ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya disebabkan oleh tidak adanya penghasilan atau pekerjaan, atau singkatnya, orang itu dapat dikatakan pengangguran. Oleh sebab itu, hal tersebut dapat menciptakan kemiskinan (Azmi & Panjawa, 2022). Faktor lain yang menyebabkan pengangguran dapat menyebabkan angka kemiskinan tinggi ialah dengan melihat banyaknya jumlah penduduk yang tidak memiliki

pekerjaan maka secara langsung akan meningkatkan jumlah penduduk miskin juga.

Kebijakan dalam mengatasi tingkat kemiskinan identik kaitannya dengan kebijakan anggaran melalui desentralisasi fiskal sebagai instrumen untuk mendukung daerah dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal, dalam kebijakannya desentransi fiskal berfungsi sebagai instrumen dalam meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi daerah yang berdampak pada kegiatan ekonomi dapat tumbuh dan berkembang, yang nantinya dapat mengatasi permasalahan yang timbul dalam menghambat pembangunan.

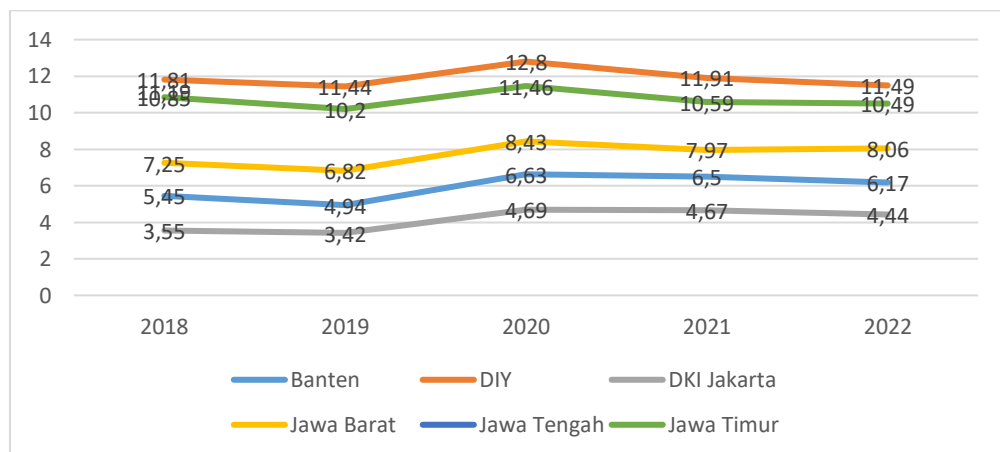
Pembangunan didorong oleh kemajuan manusia, sehingga pengalokasian anggaran menjadi hal yang utama untuk kebutuhan dalam perencanaan anggaran (Taruno, 2019). Sumber Daya Manusia (SDM) identik kaitannya dengan tingkat pendidikan dan kesehatan. Pendidikan sebagai modal dasar SDM secara tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan untuk memperoleh pekerjaan atau penghasilan. Salah satu indikator dalam kesejahteraan masyarakat ialah tingkat pendidikan, yang berarti SDM memiliki korelasi positif dengan tingkat pendidikan seseorang. (Hadi, 2019).

Di samping itu negara yang pendapatan perkapitanya lebih tinggi menyebabkan rasio kemiskinannya lebih rendah, dengan melihat hal tersebut untuk mengurangi atau mengatasi masalah kemiskinan maka yang harus diperhatikan ialah pertumbuhan ekonomi (Azmi & Panjawa, 2022). Hasil dari kebijakan ini adalah pertumbuhan ekonomi yang menjadi motor penggerak penurunan angka kemiskinan yang tinggi. Analisis ekonometrik juga

menjelaskan bahwa sifat belanja Pemerintah dapat mengatasi kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. (Sasmal & Sasmal, 2016).

Kemiskinan ialah permasalahan yang pasti dialami di setiap daerah di Indonesia, termasuk Pulau Jawa dengan kepadatan penduduk mencapai angka 151,59 juta jiwa km<sup>2</sup>, dapat dikatakan bahwa hampir separuh penduduk total dari negara Indonesia menempati Pulau Jawa. Masalah Kemiskinan ini bukan hanya menjadi persoalan tingkat nasional saja, melainkan juga menyebarr ke berbagai daerah, seperti pada Provinsi DIY. Provinsi DIY adalah salah satu provinsi dengan salah satu angka penduduk miskin yang tertinggi di Indonesia. Tingkat kemiskinan pada provinsi tersebut jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan secara nasional telah melampaui presentase kemiskinan secara nasional.

**Gambar 1. 1 Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2018-2022  
(Dalam persen)**

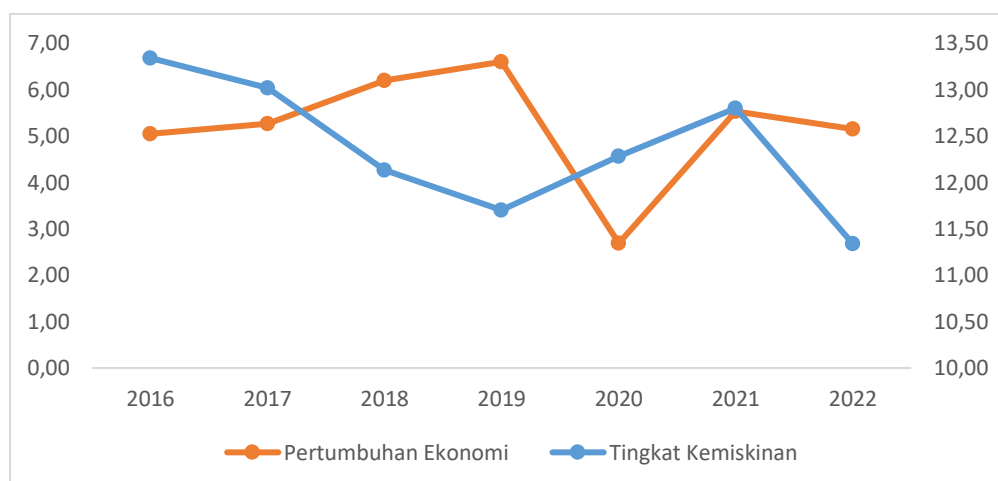


*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)*

Menurut gambar 1.1 tentang tingkat kemiskinan di Pulau Jawa dalam rentang waktu 2018 hingga 2022, provinsi dengan presentase tingkat kemiskinan tertinggi ialah Provinsi DIY dengan presentase tingkat kemiskinan sebesar 11,49% di tahun 2022. Jika melihat secara keseluruhan di

Provinsi DIY dari tahun 2018 hingga 2022 menurun secara konsisten walau tidak signifikan yaitu sebesar 0,32%, tepatnya pada tahun 2018 di angka 11,81% dan pada 2022 turun menjadi 11,49%. Tinggi rendahnya tingkat persentase suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan, kesehatan, akses terhadap layanan, letak geografis, dan konteks lingkungan yang seluruhnya saling berkaitan. (Fadila & Marwan, 2020). Faktor lain yang menyebabkan tingkat kemiskinan suatu daerah ialah presentase pertumbuhan ekonominya.

**Gambar 1. 2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkat Kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2022**



*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)*

Melihat grafik di atas dapat disimpulkan jika pertumbuhan ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara tahunan mengalami fenomena fluktuatif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi dan tumbuh hanya 2,69% di tahun 2020 karena ada peristiwa Covid-19 dan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2021 tumbuh menjadi 5,53%. Sejalan dengan hal itu tingkat kemiskinan juga mengalami fluktuasi dimulai tahun 2016 di angka 13,34 turun hingga di

angka 11,70% pada tahun 2019 tetapi naik kembali tingkat kemiskinannya di angka 12,28% pada tahun 2020.

Pertumbuhan ekonomi yang kuat merupakan kunci untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan daya beli, sehingga secara langsung berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

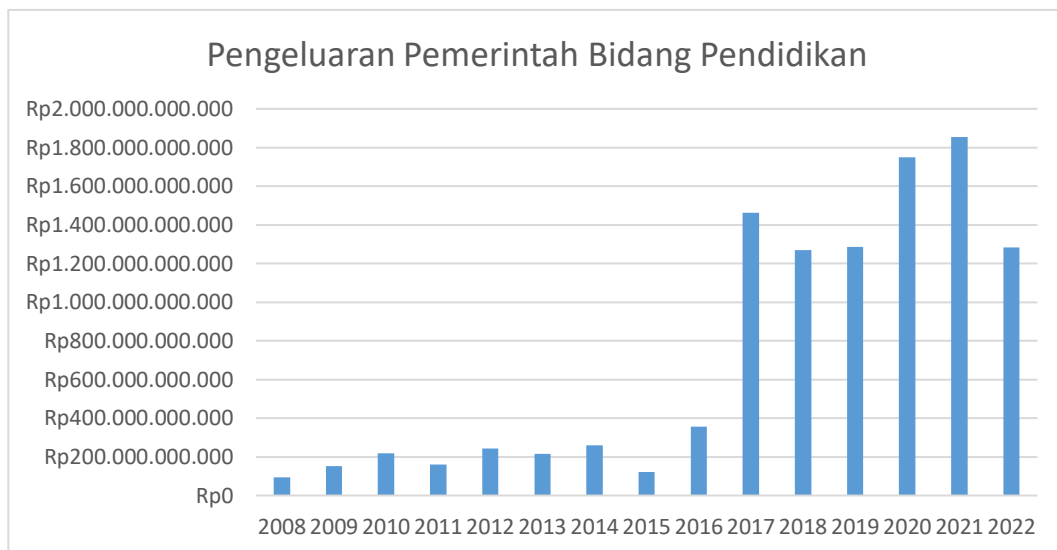
Apabila melihat Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintah secara desentralisasi yang artinya setiap daerah diberikan hak dan wewenang dalam mengurus, mengatur, dan menjalankan pemerintahan daerahnya sendiri. Pemerintah pusat dalam melimpahkan kewenangan dalam mengatur daerahnya sendiri kepada pemerintah daerah, juga termasuk mengenai pendanaan. Pemerintah daerah, dengan kewenangan dan dukungan dari pemerintah pusat, termasuk pendanaan melalui transfer pemerintah pusat, diharapkan dapat memberikan pelayanan masyarakat yang berkualitas tinggi (R, 2020).

Dalam menurunkan angka kemiskinan diperlukan SDM yang berkualitas yang memerlukan sarana dan prasarana. Oleh sebab itu, dibutuhkan juga investasi dalam hal ini bertujuan meningkatkan kualitas dari SDM itu sendiri, seperti investasi di sektor pendidikan (Muliza et al., 2017). Salah satu peranan pemerintah daerah menurut UU yang telah disahkan tersebut maka pemerintah daerah dengan kekuasaan penuh dan dapat menetapkan sendiri jumlah dana

yang akan dialokasikan, terutama untuk fungsi pendidikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sektor pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang penting di wilayah mana pun. Pencapaian tujuan ini memerlukan dukungan finansial, sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk berkolaborasi dalam membangun sarana dan prasarana pendidikan melalui belanja pemerintah. Alokasi dana pemerintah menjadi indikator pengambilan kebijakan daerah. Pendanaan ini sangat penting untuk mendukung sektor publik yang vital, khususnya pendidikan.

**Gambar 1. 3**  
**Realisasi Belanja Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta 2008-2022**

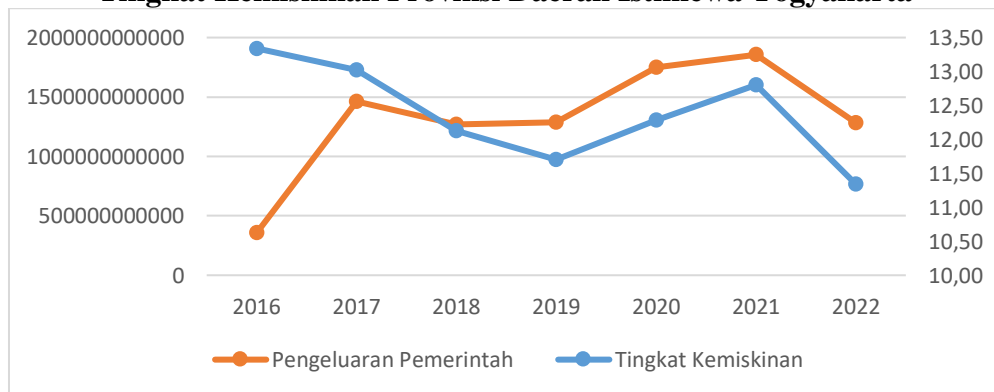


*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)*

Pada gambar di atas termuat alokasi pengeluaran pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tahun 2008 – 2022. Grafik menunjukkan fluktuasi dari penganggaran dari fungsi pendidikan itu sendiri pada tahun 2008 APBD untuk pendidikan sejumlah Rp82.751.474.991 dan pada tahun 2022 anggaran tersebut naik menjadi Rp1.282.083.051.000. Peningkatannya cukup

signifikan yaitu naik sebesar Rp1.199.331.576.009 dan merupakan angka yang sangat besar jika melihat hal tersebut. Tingginya realisasi anggaran menurut fungsi pendidikan belum sepenuhnya dapat mengatasi kemiskinan karena pada nyatanya jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, Provinsi DIY ialah satu dari sekian provinsi termiskin di Pulau Jawa. Dengan jumlah realisasi anggaran pendidikan yang mencapai Rp1.282.083.051.000 tahun 2022 sedangkan tingkat kemiskinan pada tahun yang sama masih mencapai angka 11,44% di Provinsi DIY.

**Gambar 1. 4 Perbandingan Realisasi Belanja Pendidikan dengan Tingkat Kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Meningkatnya realisasi pengeluaran pemerintah bidang pendidikan menandakan keseriusan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Tetapi pengeluaran tersebut tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat ataupun mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi, karena alokasi anggaran tidak sepenuhnya ditujukan untuk peningkatan mutu pendidikan, namun juga disalurkan kepada pegawai dan bidang lainnya, maka *outcome* dari kebijakan ini adalah pertumbuhan ekonomi yang menjadi motor penggerak penurunan angka kemiskinan yang tinggi. Selain itu, analisis ekonometrik menyoroti bahwa sifat belanja pemerintah dapat berkontribusi

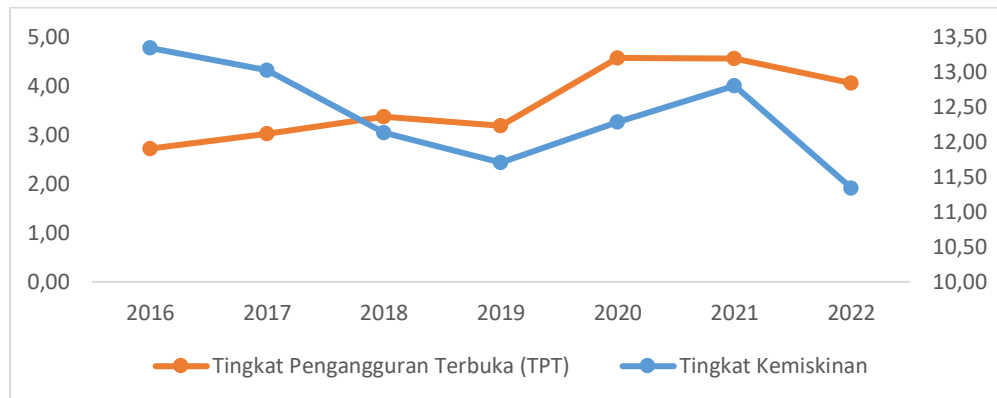


signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan mengatasi tingkat kemiskinan yang tinggi (Taruno, 2019). Perubahan yang terjadi akibat dari alokasi anggaran pemerintah bidang pendidikan yang meningkat dampaknya tidak bisa langsung dirasakan; sebaliknya, dibutuhkan beberapa periode atau beberapa waktu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.

Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memainkan peran krusial dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan alokasi dana yang memadai untuk pendidikan, diharapkan akses dan mutu pendidikan meningkat, sehingga masyarakat memiliki keterampilan yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidup mereka. Belanja pemerintah yang tepat dan berkualitas ialah yang berdampak ganda pada pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan dan penurunan tingkat kemiskinan (Khairunnisa et al., 2021).

Sejalan dengan hal itu, pengangguran sangat berpengaruh terhadap kemiskinan di suatu daerah, pengangguran dapat menyebabkan angka kemiskinan tinggi karena dengan banyaknya angka pengangguran maka pada penduduk secara langsung tidak memiliki penghasilan yang membuat tingkat kemiskinan meningkat. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam dilihat pada grafik di bawah.

**Gambar 1. 5 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan Tingkat Kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 – 2022**



*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)*

Melihat grafik di atas dapat disimpulkan adanya fluktuasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan diikuti angka kemiskinan juga berfluktuasi. Provinsi DIY memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa dengan persentase 11,49% pada tahun 2022, yang meskipun mengalami penurunan dari tahun 2018, masih jauh di atas rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi di provinsi ini juga menunjukkan fluktuasi yang signifikan, terutama selama periode pandemi COVID-19. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang tinggi turut memperparah kondisi kemiskinan. Peningkatan alokasi anggaran pendidikan oleh pemerintah daerah juga belum mampu secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan di DIY, mengindikasikan perlunya analisis lebih dalam mengenai efektivitas pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan.

TPT merupakan indikator utama yang mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja dan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tingginya TPT menunjukkan kurangnya lapangan kerja yang dapat menyebabkan

peningkatan kemiskinan. Dengan memahami dan mengelola TPT, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang efektif untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pada akhirnya menurunkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

Penelitian ini memiliki urgensi tinggi mengingat peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menurunkan tingkat kemiskinan. Dengan memahami bagaimana pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terbuka mempengaruhi kemiskinan, dapat diidentifikasi kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi kemiskinan di DIY. Hal ini penting untuk memastikan bahwa alokasi anggaran dan kebijakan ekonomi dapat memberikan dampak yang nyata dan positif bagi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, Peneliti terdorong untuk mengkaji masalah tersebut lebih lanjut dan akan meneliti sejauh mana pengaruh faktor-faktor pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam periode tahun yang akan dianalisis ialah dari tahun 2008 - 2022. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian yang sudah dijabarkan secara singkat pada latar belakang maka akan diambil kesimpulan menjadi beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah Pengeluaran Pemerintah pada Bidang Pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)?
2. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)?
3. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan merujuk pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini akan mempunyai beberapa tujuan, di antaranya:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang Pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY.

## **1.4 Ruang Lingkup**

Penelitian ini berfokus pada bidang pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebagai variabel terikat karena latar

belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya. Selanjutnya, sebagai variabel bebas, kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dijalankan antara lain adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi Penulis: Penelitian ini mampu memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan terkait
  - b. Bagi Universitas: Penelitian ini dimaksudkan menjadi sebagai tambahan acuan dan dijadikan informasi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan serupa.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Pemerintah: Penelitian ini diharapkan bisa berfungsi sebagai referensi dan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan yang berhubungan dengan mengentaskan Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) serta Pertumbuhan ekonomi sebagai acuannya.
  - b. Bagi Pembaca: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dan menambah wawasan bagi pihak-pihak terkait dan berkepentingan dengan masalah yang diteliti.